

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan ATK Dinas Pangan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya ATK Dinas Pangan.

- f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.457.600,- dan realisasi keuangan Rp. 23.456.600,- atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan dokumen, dengan capaian kinerja berupa lancarnya kebutuhan foto copy, penjilidan dan cetak dokumen.
- g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.660.000,- dan realisasi keuangan Rp. 3.656.000,- atau 99,89% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat listrik dan elektronik serta pemeliharaan jaringan listrik, dengan capaian kinerja berupa lancarnya jaringan listrik/penerangan.
- h. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.980.000,- dan realisasi keuangan Rp.12.897.500,- atau 99,36% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.
- i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.904.000,- dan realisasi keuangan Rp.142.855.628,- atau 99,97% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 81.500.000,- atau 99,39% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung dinas pangan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan rutin kantor.

- b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 22.627.500,- atau 98,38% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa gedung kantor yang kondusif.
- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.581.700,- dan realisasi keuangan Rp. 97.767.505,- atau 99,17% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor, dengan capaian kinerja berupa service, BBM, suku cadang, KIR dan Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.849.300,- dan realisasi keuangan Rp. 13.899.300,- atau 93,60% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bagi tokoh masyarakat di Nagari.
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.875.000,- dan realisasi keuangan Rp. 25.600.000,- atau 85,69% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya pelatihan dan bimtek bagi aparatur dengan capaian kinerja meningkatnya pengetahuan aparatur.

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- a. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.845.000,- dan realisasi keuangan Rp. 185.558.550,- atau 93,32% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :
 - a. Tersedianya data dan informasi tentang peta kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA);

- b. Terdeteksinya kejadian rawan pangan dan gizi;
- c. Terdistribusinya bantuan kejadian kerawanan pangan.

Dengan capaian kinerja berupa terpantaunya situasi Pangan dan Gizi daerah.

- b. Kegiatan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.917.000,- dan realisasi keuangan Rp. 14.327.000,- atau 90,01% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya data informasi tentang ketersediaan distribusi dan pasokan pangan melalui NBM, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya koordinasi upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat sesuai potensi daerah.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 289.800.500,- dan realisasi keuangan Rp. 289.377.500,- atau 99,85% atau realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kecamatan, terlaksananya lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten, terlaksananya pencaangan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, tersalurnya bantuan bibit/benih tanaman sayur/buah bagi kelompok masyarakat, tersusunnya informasi tentang situasi pola konsumsi pangan masyarakat melalui data sekunder dalam bentuk buku, terlaksananya pembuatan media promosi design baliho, dengan capaian kinerja meningkatnya penggunaan lahan pekarangan dalam rangka upaya pemenuhan pangan dan gizi keluarga terwujudnya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan serta terpantaunya situasi konsumsi pangan masyarakat.
- d. Kegiatan Pemantauan dan Analisis akses Pangan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.732.300,- dan realisasi keuangan Rp. 120.496.932,- atau 95,08% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :
 - a. Terlaksananya pemantauan distribusi akses dan harga;
 - b. Terlaksananya pertemuan panel harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
 - c. Terlaksananya pengumpulan data jaringan distribusi pangan dan terakomodirnya komoditi pangan lokal melalui pameran;
 - d. Tersedianya baliho pangan.

dengan capaian kinerja berupa adalah terlaksananya pengumpulan data jaringan distribusi pangan dan terakomodirnya komoditi pangan lokal melalui pameran.

- e. Kegiatan Pengembangan cadangan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.745.000,- dan realisasi keuangan Rp. 93.216.000,- atau 99,44% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah dengan capaian kinerja berupa :
 - a. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi anatar kelembagaan kegiatan ketahanan pangan SOPD terkait
 - b. Teratasinya masalah kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana social dan keadaan darurat.
- f. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 341.587.900,- dan realisasi keuangan Rp. 310.937.113,- atau 91,03% dengan realisasi fisik mencapai 96,11%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :
 - a. Terlaksananya sosialisasi Gerakan Kemandirian Pangan
 - b. Terlaksananya Launching Nagari Mantap Tingkat Kabupaten
 - c. Terlaksananya Bantuan dana bergulir pada kelompok Nagari Mandiri Pangan
 - d. Terlaksananya survey ketersediaan energy dan protein minimal
 - e. Terlaksananya pertemuan integrasi kegiatan 3G
 - f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Nagari Mandiri PanganDengan capaian kinerja berupa meningkatnya upaya masyarakat dalam mewujudkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup merata dan aman
- g. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.692.600,- dan realisasi keuangan Rp. 233.072.600,- atau 99,31% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :
 - a. Tersedianya bangunan fisik dan lantai jemur lumbung pangan.
 - b. Terlaksananya bimbingan teknis pengelola Lumbung Pangan.
 - c. Terlaksananya monitoring dan pembinaan kelompok lumbung pangan dan kelompok tani.

d. Terlaksananya Sosialisasi, Pertemuan dan Evaluasi.

Dengan capaian kinerja berupa teratasinya masalah kerawanan pangan transien, pasca bencana dan akibat gejolak harga pangan.

h. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.179.000,- dan realisasi keuangan Rp. 138.540.500,- atau 98,83% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

a. Terlaksananya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar;

b. Terlaksananya Sosialisasi dan keamanan pangan bagi penjual jajanan sekolah, guru, masyarakat dan aparat terkait.

c. Terlaksananya sosialisasi B2SA

d. Terlaksananya sosialisasi dan edukasi mutu dan keamanan pangan bagi murid SD

e. Terlaksananya Uji Laboratorium sampel pangan segar;

f. Tersedianya perlengkapan (Alat dan bahan) keperluan uji sederhana sampel pangan (Rapid test) pangan segar;

g. Terlaksananya promosi melalui media surat kabar

h. Tersediaanya Booklet keamanan pangan;

Dengan capaian kinerja berupa meningkatnya mutu dan keamanan konsumsi pangan masyarakat.

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a. Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.959.900,- dan realisasi keuangan Rp. 100.188.050,- atau 98,26% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

b. Terlaksananya Pelatihan teknis SDM pangan;

c. Terlaksananya seminar pangan daerah;

d. Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan local

e. Terlaksananya Lomba cipta menu B2SA Tk. Kabupaten dan Propinsi

f. Terlaksananya lomba pengolahan pangan local Tk. Kabupaten dan Propinsi

g. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kegiatan pelatihan petani.

Dengan capaian kinerja berupa semakin meningkatnya pengetahuan keterampilan tentang pangan.

- b. Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.787.500,- dan realisasi keuangan Rp. 19.170.500,- atau 96,88% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan pembinaan kelompok pengolahan pangan local di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian kinerja berupa semakin meningkatnya kemampuan mengolah kelompok pengolahan pangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama (Beras) pertahun

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Beras sebagai salah satu pangan pokok strategis perlu diperhatikan ketersediaannya. Pemenuhan kebutuhan akan beras dapat diperhatikan dari beberapa aspek antara lain jumlah produksi, ketersediaan lahan, tingkat konversi lahan, jumlah penduduk serta jumlah konsumsi beras penduduk. Beras merupakan komoditas yang penting karena beras merupakan kebutuhan pangan pokok yang setiap saat harus dipenuhi kebutuhan pangan pokok perlu diupayakan ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, mutu baik, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat secara agregat dapat diketahui dengan menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*), dan penggunaan pangan (*food utilization*), hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan

pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram per kapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita perhari yang dinyatakan dalam satuan Kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energy) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak yang sangat relevan dalam penyusunan NBM, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait terutama data yang telah dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik. SKPD yang terlibat antara lain BPS, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan Makanan

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan (kg/kap/th)	Kebutuhan (kg/kap/th)	Perimbangan (%)
1	Padi-padian	410,38	130,78	313,79
2	Beras	349,62	123,22	283,74
3	Makanan Berpati	194,39	16,97	1145,49
4	Buah biji Berminyak	20,37	8,21	248,11
5	Buah-Buahan	100,77	23,40	430,64
6	Sayuran	40,54	54,64	74,19
7	Daging	28,81	4,20	685,95
8	Telur	103,37	7,34	1.408,31
9	Susu	96,93	1,63	5.946,63
10	Ikan	106,76	23,32	457,80
11	Minyak & Lemak	5,75	9,45	60,85

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian ketersediaan Pangan Utama (beras) pertahun ditahun 2017 adalah sebesar 349.62 kg/kap/th dari target 380.00 kg /kap/th atau terealisasi sebesar 92,00%. Walaupun pada tahun 2017 tidak tercapai target

ketersediaan beras di Kabupaten Lima Puluh Kota namun jika dibandingkan dengan kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota telah jauh melebihi kebutuhan Beras masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 123,22 kg/kap/th.

Realisasi Ketersediaan utama = $349.62 \text{ kg/kap/th} / 380,00 \text{ kg/kap/th} \times 100\%$
(beras) = 92,00%

Ket : Target ketersediaan pangan utama (beras) tahun 2017 = 380,00 kg/kap/th

Realisasi ketersediaan pangan utama (beras) tahun 2017 = 349.62 kg/kap/th

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Lima Puluh Kota belum mencapai target yang telah ditetapkan, bila data ini diproses lebih lanjut, maka akan diperoleh ketersediaan pangan utama (beras) adalah = ketersediaan pangan utama (beras) x 380,00 kkal/100 g / 365 hari

Ketersediaan pangan utama (beras) gr/kap/hari = $349,62 \text{ kg/kap/th} \times 1000 / 365 \text{ hari}$
= 957,86 gr/kap/hari

Angka ketersediaan beras di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melebihi angka Konsumsi beras Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 sebesar 282,5 gr/kap/hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat penyediaan bahan pangan (beras) tahun 2017 sudah jauh diatas tingkat konsumsi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan pasokan pangan untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga pangan dalam daerah.

Rangkaian Program dan Kegiatan yang diupayakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan menjaga dan meningkatkan ketersediaan utama (beras) tahun 2017 sebesar 92% dengan kriteria sangat tinggi.

Permasalahan ketersediaan pangan utama (beras) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 dibanding target yang ditentukan disebabkan beberapa faktor diantaranya seringnya terjadi bencana alam banjir yang mengakibatkan banyak lahan pertanian yang gagal panen. Kemudian semakin banyaknya pengalihan lahan pertanian yang produktif oleh masyarakat menjadi tempat usaha dan pemukiman sehingga jumlah lahan pertanian yang produktif semakin kurang.

Pemecahan masalah:

1. Melakukan kegiatan pengendalian terhadap faktor resiko terjadinya bencana alam (banjir) dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang upaya-upaya pengendalian bencana.
2. Membuat kebijakan seperti Peraturan Daerah tentang penggunaan tata guna lahan, sehingga masyarakat mempunyai pedoman dan aturan tentang tata guna lahan.

2. Persentase Nagari Mandiri Pangan

Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Kegiatan Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan di Nagari/Desa yang terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan berisiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa Rawan Pangan dengan jumlah RTM(Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah dewan ketahanan pangan.

Saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota telah terbina 13 Nagari Mandiri Pangan Inti dan Nagari DMP Replikasi sebanyak dengan jumlah total Nagari Mandiri Pangan sebanyak 13 Nagari. Bila dikalkulasikan dengan 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota telah terbina 13 Nagari Mandiri Pangan atau tercapainya 16.45%. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Nagari Mandiri pangan} &= 16.45\% / 20\% \times 100\% \\ \text{yang telah dibina} &= 82,25\% \end{aligned}$$

Ket : Target Persentase nagari Mandiri Pangan Tahun 2017 = 20%

Realisasi Persentase Nagari Mandiri Pangan tahun 2017 = 16,45%

Rangkaian Program dan Kegiatan yang diupayakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Meningkatkan Persentase Nagari Mandiri Pangan Tahun 2017 sebesar 82.25% dengan kriteria: Tinggi

Permasalahan program nagari mandiri pangan lebih banyak kepada persoalan rendahnya komitmen dari lembaga petani yang ada di nagari, seperti kepengurusan

kelompok dan anggota yang tidak aktif, kreatifitas pengurus untuk memajukan kelompok yang kurang, banyaknya dana stimulan/bergulir yang diberikan pemerintah yang berjalan, terbatasnya sumber daya manusia dalam rangka pembinaan dan pendampingan.

Pemecahan masalah yang dilakukan dengan meningkatkan pembinaan dan pembimbingan kepada kelompok tani yang ada terutama kepada kelompok yang bermasalah. Perekrutan dan pelatihan tenaga kader pangan pada masing-masing nagari dan penunjukan tenaga pendamping masing-masing nagari mandiri pangan yang ditetapkan.

Secara kualitas, ketersediaan energy pangan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan angka produksi tahun 2016 yaitu 5.690 kkal/ kapita/ hari, dimana 71,9 % kontribusi kelompok padi-padian, 14,4 % umbi – umbian, 11,2 % berasal dari pangan hewani (daging, telur dan ikan), sisanya 2,5 % dari dari kelompok buah dan sayuran. Tahun 2017 berdasarkan survey ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang telah dilaksanakan didapatkan angka ketersediaan energy pangan penduduk yaitu antara 848,77 sampai dengan 5.111,85 kkal/ kapita / hari, atau rata – rata 2.220,72 kkal/ kapita/ hari. Hal ini masih dibawah angka standar penyediaan pangan yang ditetapkan secara rasional yaitu 2.400 kkal/ kapita/ hari.

3. Ketersediaan Pangan Tingkat Rumah Tangga

Untuk mengetahui jumlah cadangan pangan tingkat rumah tangga ini maka dilakukan survey ketersediaan dengan metode pengambilan sampel di seluruh rumah tangga di 13 Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah sampel sebanyak 650 orang yang tersebar secara proposional di Kecamatan dengan masing-masing kecamatan sebanyak 50 orang responden. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan data penelitian yang berasal dari sumber data yang langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dapat diukur dengan melakukan pendataan pangan yang tersedia di rumah tangga. Secara sistematis, besarnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga di ukur dengan komputerisasi.

Hasil survey 2017 menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan energi untuk masing-masing jiwa dalam satu rumah tangga adalah 1.550,40 kkal/kap/hari, sedangkan ketersediaan protein perkapita/hari adalah 28,91 gram/kap/hari.

Rata-rata ketersediaan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan survey ketersediaan tahun 2017 sebesar 256,27 gr/kap/hari. Hasil estimasi interval menunjukkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata ketersediaan responden adalah diantara 230,22 gr/kap/hari sampai dengan 282,31 gr/kap/hari. Dimana dari hasil ini ketersediaan pangan tingkat rumah tangga belum mencapai target Dinas Pangan Lima Puluh Kota sebesar 330 gr/kap/hari. Dari hasil survey rendahnya ketersediaan tingkat rumah tangga dipengaruhi oleh faktor pendapatan selain itu pendidikan dan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga juga dapat menyebabkan rendahnya penyediaan pangan dirumah tangga itu sendiri, termasuk penyediaan energi dan protein yang dibutuhkan masing-masing individu dalam satu keluarga. Artinya ketersediaan pangan dalam satu keluarga mempengaruhi banyaknya asupan makan anggota keluarga. Semakin baik ketersediaan pangan suatu keluarga memungkinkan terpenuhinya selueuh kebutuhan zat gizi.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*), cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Angka PPH 2017 adalah sebesar 65,9 dimana tidak tercapainya target tahun 2017 sebesar 88,2 dimana hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin jauh dari keragaman dan keseimbangan konsumsi yang dianjurkan sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang dan aman perlu semakin ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

Angka konsumsi energi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah sebesar 1.902 Kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein sebesar 46.6 gram/kapita/hari. Untuk tahun 2017 ini angka kecukupan gizi yang dianjurkan merujuk kepada hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke- X tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2013 dimana standar untuk Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 kkal/kap/hari. Angka Kecukupan Energi ini dijadikan target konsumsi energi Nasional (2.150 Kkal/kapita/hari), angka konsumsi energi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 lebih kecil dari target. Capaian konsumsi energi tahun 2017 sebesar 95.1% dan konsumsi protein dengan rata-rata capaian tahun 2017 sebesar 89.6%. rendahnya angka konsumsi Energi ini disebabkan karena rendahnya jumlah konsumsi pangan lainnya. Penyumbang konsumsi energi terbesar berada pada kelompok pangan padi-padian dan minyak dan lemak. Sedangkan umbi-umbian, pangan hewani sayur dan buah berada jauh dibawah